

Penguatan Moderasi Beragama dalam Perspektif Politik di Kabupaten Kotawaringin Timur

Abdul Gofur^{1*}, Abdul Wahid², Nur Napisah³
^{1,2,3}Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, FTIK

IAIN Palangka Raya

*abdul.gofur@iain-palangkaraya.ac.id

ABSTRACT

The aim of this research is to describe strengthening religious moderation through political education in East Kotawaringin Regency. This strengthening was carried out through two activities by the National and Political Unity Agency (Kesbangpol) and the Religious Harmony Forum (FKUB). This type of research uses qualitative research with a qualitative descriptive approach. Data collection techniques use interviews and documentation. The data analysis technique goes through stages in the form of: data collection, data reduction, data presentation and drawing conclusions. The research results showed that strengthening religious moderation in East Kotawaringin Regency was carried out through collaboration between government and non-government institutions, elements of society and community organizations (ormas). The emphasis is on instilling the values of tolerance in politics through; respecting each individual's choice in elections, avoiding fraudulent practices or being involved in money politics, the practice of exercising the right to vote, associating and assembling without any intervention from any party, equal rights for every citizen in politics and changing the mental attitude of the younger generation. The development of the concept of religious moderation in this city needs to be reviewed again regarding its effectiveness in society.

Keywords: *religious moderation, politics, tolerance, Kesbangpol, FKUB, East Kotawaringin*

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan penguatan moderasi beragama melalui pendidikan politik di Kabupaten Kotawaringin Timur. Penguatan ini dilakukan melalui dua kegiatan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Jenis penelitian menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data melalui tahapan berupa: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Pada hasil penelitian didapatkan data bahwa penguatan moderasi beragama di Kabupaten Kotawaringin Timur dilakukan atas kerjasama antar lembaga pemerintah maupun non pemerintah, elemen masyarakat dan organisasi kemasyarakatan (ormas). Penekanan dilakukan terhadap penanaman nilai-nilai toleransi dalam berpolitik melalui; menghormati pilihan masing-masing individu didalam pemilu, menghindari praktik kecurangan maupun terlibat di dalam politik uang, praktik penggunaan hak pilih, berserikat dan berkumpul tanpa adanya intervensi dari pihak manapun, persamaan terhadap hak-hak setiap warga

negara dalam berpolitik dan perubahan sikap mental generasi muda. Pengembangan konsep moderasi beragama di kota ini perlu dilihat lagi keefektifan di tengah masyarakat.

Kata kunci: Moderasi beragama, politik, toleransi, kesbangpol, FKUB, Kotawaringin Timur

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. ©2023 by the author(s).

Received: 27 August 2023

Revised: 10 September 2023

Accepted: 25 September 2023



PENDAHULUAN

Indonesia merupakan bangsa yang memiliki keberagaman baik dari aspek agama, suku, ras dan golongan. Keberagaman ini dapat dilihat sebagai modal sosial dalam mengembangkan potensi dan kreativitas masyarakat yang berkarakter lokal menghadapi gempuran globalisasi. Modal sosial ini perlu dijaga oleh masyarakat sebagai memori kolektif akan kekayaan budaya masyarakat yang dimiliki oleh bangsa Indonesia (Aksa & Nurhayati, 2020). Namun, di sisi lainnya, keberagaman ini dapat dilihat menjadi tantangan serta ancaman bagi bangsa Indonesia. Dalam pandangan agama Islam, keberagaman merupakan *sunatullah* dan fakta yang harus diterima oleh umat manusia. Sehingga manusia diharapkan untuk saling mengenal agar terciptanya toleransi.

Sebagai negara demokrasi maka setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban dalam melakukan partisipasi politik. Representasi sebuah negara yang menjalankan sistem demokrasi berasal dari partisipasi warga negara yang dilakukan melalui proses pengambilan keputusan politik (Meyer, 2009). Pada tataran realitas politik saat ini masih terjadi politisasi etnis, suku dan golongan. Contohnya adalah pemilihan Gubernur Maluku Utara pada tahun 2013 yang secara sadar dikonstruksi oleh para aktor informal dan struktur partai politik. Konstruksi ini bertujuan untuk mengeksitensikan semangat etnis dalam meraih dukungan politik dari masyarakat ataupun kelompok etnisnya.

Proses reproduksi politik identitas etnis yang berlaku dalam Pilkada Maluku Utara pun tampil menjadi kekuatan politik yang dominan (Salim, 2016). Sementara itu, contoh lainnya adalah pada saat Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 juga terjadi polarisasi yang sangat dalam melalui agama. Kasus penistaan agama menjadi delik yang digunakan sehingga memunculkan perlawanan melalui hadirnya 'musuh' bersama yang dikonstruksikan, yaitu: Ahok. Polarisasi dilakukan dengan membagi kelompok yang anti dan mendukung Ahok. Jika Anti Ahok dianggap sebagai "pendukung rasisme yang intoleran" dan jika mendukung Ahok dianggap sebagai "pendukung keragaman (pluralisme) yang sekuler" (Prayogi, 2019).

Sementara itu, di tingkat nasional pada saat Pemilihan Umum 2019, politik identitas berbasis agama kembali menguat dengan beredarnya narasi-narasi populisme yang didalamnya memuat narasi bahwa pemerintah anti islam juga dianggap memarginalkan kelompok muslim. Hal ini dapat terlihat dari narasi-narasi berupa "partai setan vs partai Allah", *people power*, dan narasi-narasi yang tidak percaya pada lembaga-lembaga negara seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Jika politik identitas terus diperlihara maka polarisasi akan terjadi pada masyarakat. Hal ini tentu dapat memberikan dampak buruk hingga menyebabkan perpecahan (Ardipandanto, 2020)

Pasca kontestasi politik pada pemilihan presiden maupun pemilihan kepala daerah, justru di dalam ruang media sosial berkembang istilah "kadrun" (kadal gurun) yang dilabelkan pada kelompok oposisi pemerintahan. Kadrun kemudian menjadi potret identitas agama dan komoditas propaganda politik. Kadrun syarat dengan stigma negatif terhadap simbol Islam yang bagi kalangan tertentu juga sekaligus dijadikan sebagai identitas agama Islam. Labelisasi 'kadrun' menjadi alat propaganda politik untuk menyerang kelompok oposisi baik muslim maupun non muslim. Hal ini sangat bertentangan dengan semangat demokrasi yang memberikan kebebasan berpendapat bagi warga negara.

Perbedaan pendapat harusnya diwadahi dalam dialog rasional yang jauh dari sentimen SARA. *Labeling* berbasis agama hanya akan mempertajam keterbelahan sosial maupun polarisasi di dalam Masyarakat (Hayat & Nurhakki, 2022). Salah satu contoh konflik terbesar dan memakan jumlah jiwa yang banyak adalah konflik Sampit. Konflik ini telah menambah panjang daftar konflik yang bernuansa SARA di tanah air (Choiri, 2013).

Tahun 2017 merupakan tahun kemunduran demokrasi di Indonesia. Hal ini disebabkan karena polarisasi yang terjadi di dalam masyarakat. Para ahli melihat terdapat kelompok yang mengarusutamakan moralitas Islam konservatif di satu sisi dan hipernasionalisme yang bersifat reaksioner di sisi lainnya. Belajar dari konflik yang terjadi pada pemilihan gubernur Jakarta tahun 2017, masyarakat

menjadi sangat terpolarisasi dan emosional dalam merespon isu-isu yang cukup sensitif. Hal ini mengakibatkan meningkatnya ancaman terhadap demokrasi liberal dan munculnya dorongan politik anti-pluralis di berbagai lapisan masyarakat di Indonesia (Hadiz, 2017).

Dua kelompok Islam terbesar di Indonesia, yaitu: Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama telah berkomitmen untuk mempertahankan dan mempromosikan pemahaman Islam yang damai. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh organisasi-organisasi ini adalah kebangkitan pemahaman Islam konservatif yang memosisikan agama sebagai sesuatu hal yang sifatnya eksklusif. Pandangan tersebut tentu bertentangan dengan budaya Indonesia yang beragama. Sementara itu, penerapan nilai-nilai Islam yang hakiki dalam segala aspek kehidupan serta saling menghormati antara semua pihak diperlukan (Jubba et al., 2022).

Berbagai contoh di atas mengalami peningkatan, khususnya dengan adanya momentum Pilkada (Anggraeni & Adrinoviarini, 2020). Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan salah satu wilayah yang akan melaksanakan pemilihan umum serentak pada tahun 2024 mulai dari pemilihan bupati dan wakil bupati, gubernur dan wakil gubernur, pemilu legislatif hingga pemilihan presiden. Untuk itu diperlukan pendidikan politik di tengah masyarakatnya yang dilakukan melalui penguatan moderasi beragama. Adapun lembaga yang berperan dalam menjaga relasi sosial serta stabilitas politik di tengah masyarakat yang heterogen adalah lembaga kesatuan bangsa dan politik (Kesbangpol) dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Berbagai fungsi Kesbangpol dalam menciptakan masyarakat yang rukun telah banyak dilakukan di berbagai tempat di Indonesia (Al Hady, 2023). Namun, tentunya di setiap daerah memiliki ciri spesifik yang membedakan akar permasalahan dan terjadinya konflik. Artikel ini akan menjawab pertanyaan: bagaimana peran Kesbangpol dan FKUB dalam melakukan moderasi beragama di Kotawaringin Timur?

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Lexy J. Moloeng, 2012). Sebagaimana diketahui bahwa Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan salah satu wilayah yang memiliki sejarah konflik yang panjang. Konteks dari penelitian ini adalah pelaksanaan pemilihan umum serentak pada tahun 2024 mulai dari pemilihan bupati dan wakil bupati, gubernur dan wakil gubernur, pemilu legislatif hingga pemilihan presiden. Sumber data primer diperoleh dari keterangan kepala badan serta kepala bidang pada Kesbangpol serta anggota FKUB Kabupaten Kotawaringin Timur. Sumber data skunder

berasal dari buku, dokumen pribadi, serta dokumen resmi. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data melalui tahapan: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kesbangpol Kabupaten Kotawaringin Timur

Badan Kesbangpol memiliki berbagai fungsi, diantaranya: merumuskan kebijakan teknis dan pembinaan urusan bina ideologi, wawasan kebangsaan, karakter bangsa, politik dalam negeri, ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama, organisasi kemasyarakatan, penanganan konflik, dan kewaspadaan nasional. Badan kesbangpol juga memiliki fungsi sebagai lembaga yang mengupayakan pencegahan preventif terhadap munculnya potensi konflik sosial, etnik, hingga persoalan politik.

Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah merupakan wilayah yang heterogen secara suku, agama dan ras. Fakta ini memberikan peluang sekaligus ancaman yang dapat berpotensi terjadinya konflik. Lembaga Kesbangpol berfungsi melakukan upaya preventif terhadap peristiwa, gejala maupun potensi-potensi konflik. Pada prinsipnya, lembaga ini berfungsi sebagai mata dan telinga dari pemerintah daerah dalam rangka pengambilan kebijakan.

Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan salah satu wilayah yang banyak ditempati oleh perusahaan kelapa sawit. Hal ini berdampak pada meningkatnya pendatang dari berbagai penjuru Indonesia dan menciptakan peningkatan heterogenitas suku, agama dan ras. Dalam pandangan Kesbangpol, pemerintah hendaknya perlu menyediakan sarana dan prasarana tempat ibadah, pendidikan dan potensi konflik agraria antara masyarakat lokal dengan pendatang. Perusahaan tidak diperbolehkan hanya mementingkan kepentingan dari aspek ekonomi saja. Aspek lainnya seperti penyediaan sarana beribadah juga dibutuhkan oleh masyarakat. Dari pantauan Kesbangpol Kabupaten Kotawaringin Timur, masih ada di beberapa wilayah perusahaan yang tidak menyediakan tempat ibadah baik mushala, mesjid maupun gereja. Penyediaan sarana peribadatan tentunya menjadi penting dalam rangka menumbuhkan mental dan keimanan masyarakat.

Pada tahun 2022, pemerintah daerah sudah mulai melakukan beberapa perubahan mulai dari pengelolaan sumber daya manusia hingga perbaikan terhadap gedung kantor yang lebih layak. Beberapa hal yang menjadi kendala diakibatkan oleh anggaran yang minim adalah kurangnya sosialisasi maupun pendidikan politik yang diberikan kepada masyarakat, terutama kepada masyarakat yang masuk wilayah perkebunan. Pada tahun 2023 terdapat kenaikan

anggaran untuk kegiatan sebesar Rp 100 juta, sehingga dengan besaran anggaran tersebut, kegiatan berusaha dioptimalkan.

Kesbangpol juga melakukan upaya kolaborasi dengan lembaga lain seperti Kementerian Agama Kabupaten Kotawaringin, KPUD Kabupaten Kotawaringin Timur, Kodim 1015 Sampit, Polres Kotawaringin Timur serta Bawaslu Kotawaringin Timur. Pelaksanaan kegiatan yang sudah dilakukan di beberapa wilayah diantaranya: Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, Kecamatan Kota Besi, Kecamatan Telawang, Kecamatan Parenggean serta Kecamatan Antang Kalang.



Gambar 1. Pendidikan politik dari Kesbangpol Kotawaringin Timur

Saat ini badan Kesbangpol sedang merintis program yang melibatkan generasi milenial agar tercipta hubungan antar umat beragama yang rukun dan harmonis. Peserta yang dilibatkan pada program ini yaitu: perwakilan kelompok pemuda dari agama Islam (Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama), pemuda Protestan, Katholik, Hindu, Budha dan Konghucu. Berdasarkan data pemilihan pada pemilu tahun 2024, 60% berasal dari generasi muda. Anak muda juga merupakan aset masa depan, dimana dari segi pemikirannya masih menjunjung tinggi idealisme dalam menjalankan tonggak kepemimpinan. Program tersebut dinamakan “kemah pemuda keagamaan” yang dilaksanakan di ujung Pandaran. Kemah ini bertujuan untuk membangun komitmen, menjaga dan merawat kebhinekaan serta memupuk kesadaran bahwa negara Indonesia adalah negara yang majemuk. Di masa yang akan datang juga direncanakan untuk membuat program kerja bakti pemuda yang melibatkan seluruh unsur agama. Langkah ini merupakan sebagai upaya membuka mata hati dan pikiran agar umat beragama dapat memposisikan diri secara tepat dalam masyarakat yang *religious* sehingga tercipta harmonisasi dan keseimbangan dalam masyarakat.

Menjelang pemilu 2024 pada saat ini Kesbangpol lebih fokus pada pendidikan politik anak muda atau pemilih pemula berusia minimal 17 tahun. Mereka akan menggunakan hak pilihnya pada bulan Februari 2024. Seringkali pada saat melakukan kunjungan sosialisasi ke sekolah di daerah masih ditemukan siswa yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), sehingga

dilaporkan pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil (Disdukcapil) serta Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Kotawaringin Timur. Kemudian ditindaklanjuti dengan diperbolehkannya remaja tersebut untuk mengikuti pemilu dengan catatan terdaftar pada kartu keluarga. Persoalan selanjutnya adalah siswa yang pindah dari luar provinsi dan tidak memiliki KTP Kabupaten Kotawaringin Timur. Mereka tentunya tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Masalah kependudukan lainnya adalah terkait dengan pemilih yang melakukan nikah siri dan pernikahan dini yang tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA). Masyarakat yang menghadapi masalah ini kemudian didata dan disampaikan kepada Kementerian Agama. Pihak Kementerian Agama ini memberikan solusi agar masyarakat tersebut tercatat secara negara dan memiliki identitas kependudukan.

Masyarakat juga diberikan materi oleh Kesbangpol tentang pentingnya menjadi pemilih yang cerdas dengan tidak terdoda pada politik uang. Dalam setiap pemaparan materi juga selalu ditekankan bahwa pemilih pemula dan generasi muda merupakan tonggak awal untuk pemilu yang bersih. Warga negara yang memiliki hak pilih juga diharuskan untuk independen. Dalam memilih pemimpin dan wakil rakyat, masyarakat juga harus mencermati visi dan misinya. Hal ini dilakukan untuk menciptakan demokrasi dan pemilu secara langsung, umum, bebas, jujur dan adil (*luberjurdil*).

Namun demikian seringkali terjadi kontradiksi, misalnya elit politik yang mengkampanyekan anti politik identitas namun cenderung menjalankan politik identitas. Calon pemimpin juga sering memanfaatkan orang tuanya yang sedang menjabat. Hal ini terlihat pada baliho maupun media lain yang memanfaatkan kebesaran orang tua ataupun pasangannya. Hal ini dapat dilihat sebagai suatu politik dinasti di daerah. Kesbangpol berupaya melaporkan kepada Bawaslu maupun satpol PP atas tindakan yang menyalahi aturan, namun tidak ada tindakan lebih lanjut.

Kesbangpol juga berupaya untuk memberikan sosialisasi terhadap masyarakat terkait dengan politik identitas yang memecah belah masyarakat. Hal ini disebabkan karena banyak para elit politik yang memainkan identitas kesukuan, golongan maupun agama demi kepentingan elektoral. Pihak Kesbangpol juga berusaha mensosialisasikan pentingnya masyarakat untuk bijak dalam bersosial media, menghindari ujaran kebencian, menguji berita bohong serta tidak menyebarkan berita bermuatan SARA.

Kesbangpol juga bekerjasama dengan Kementerian Agama Kabupaten Kotawaringin Timur, tokoh adat, tokoh agama serta FKUB Kabupaten Kotawaringin Timur. FKUB sendiri membawahi organisasi masyarakat yang berjumlah seratus ormas dan melakukan pertemuan rutin setiap tiga bulan dalam rangka memberikan edukasi kepada masyarakat menjelang pemilu 2024.

Diantaranya kegiatan silaturahmi atau dialog kerukunan umat beragama dalam rangka mewujudkan pemilu dan pilkada 2024 yang aman dan damai.



Gambar 2. Dialog kerukunan Umat Beragama dalam rangka mewujudkan pemilu dan pilkada 2024

B. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Kotawaringin Timur

Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan wilayah yang secara komposisi lengkap memiliki enam agama dan relasi sosial di dalam masyarakat berjalan dengan baik. Menjelang tahun politik, FKUB menyampaikan agar tidak ada politisasi agama, walaupun beberapa anggota FKUB mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur. Pesta demokrasi menjadi ajang para kandidat untuk berkompetisi gagasan secara sehat, jujur, dan menjaga kesejukan. Para kandidat juga dihimbau untuk menghindari penggunaan lambang-lambang keagamaan untuk kepentingan politik sesaat.

Diskusi bersama pemangku kepentingan, pemerintah daerah, partai politik, bawaslu, kepolisian, serta tokoh lintas agama juga dilakukan agar terdapat komitmen bersama bahwa pemilu dapat berjalan dengan jujur, independent dan adil. Beberapa program dari FKUB yang sudah direncanakan tidak dapat berjalan karena minimnya anggaran. Pada tahun 2023 FKUB Kotawaringin Timur mendapatkan dana sebesar 100 juta rupiah yang diproses dalam tiga tahap. Dana pada termin pertama sudah diambil sebesar 30 Juta yang digunakan untuk kelengkapan seketariat, membeli laptop dan kelengkapan lainnya serta pembiayaan operasional pada acara rapat kerja nasional di Jakarta. Pada termin kedua FKUB fokus pada program moderasi beragama pada tingkat pelajar. FKUB berkolaborasi dengan Kesbangpol melakukan pendekatan pada kepala desa dan turun langsung ke tingkat kecamatan.

Dampak yang diharapkan adalah transformasi di dalam masyarakat terkait dengan keberagaman adalah terciptanya kerukunan umat beragama di Kotawaringin Timur. Urusan ibadah hendaknya menjadi urusan masing-masing individu, khususnya dari sisi aqidah namun kebersamaan dalam membangun NKRI yang aman dan damai juga harus dilakukan sehingga berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Di sisi lain, pendidikan politik berbasis keagamaan pada generasi muda sangat diperlukan saat ini. Generasi muda membutuhkan pemahaman terhadap moderasi beragama, terlebih dengan berkembangnya informasi politik di media sosial yang tidak terbandung. Fakta yang ditemukan di lapangan agak berbeda, secara formal terdapat FKUB, namun banyak program-program yang sudah direncanakan belum menyentuh klaster-klaster yang lain. Misalnya terkait dengan moderasi beragama yang belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat.

Asal kata moderasi beragama berarti: tidak kurang dan tidak lebih atau jalan tengah (*wasatiah*). Tindakan ini harus didukung dengan ilmu pengetahuan dan pemahaman. Salah satu upayanya adalah dengan pendidikan, terlebih pada tahun 2023 Indonesia sudah masuk pada tahun politik. Berdasarkan pengalaman dari pemilu tahun-tahun sebelumnya, pemilu telah memberikan tensi tinggi di tengah masyarakat. Ketika berkontestasi dalam pemilu dan pilkada, para calon legislatif akan melakukan segala cara untuk meraih kemenangan, upaya ini yang menjadi tantangan FKUB terutama pada tokoh-tokoh masyarakat.

Berdasarkan pengamatan penulis, FKUB hanya berteori saja, tanpa melakukan transformasi mendasar di dalam masyarakat. Program FKUB dilakukan melalui sosialisasi di 17 kecamatan di Kotawaringin Timur. Sosialisasi ini dilakukan karena berdasarkan sejarahnya, di Sampit sendiri pernah mengalami konflik pada tahun 2001. Pemicunya adalah karena masing-masing calon saling menjagokan tokohnya. Hal ini tentu menjadi potensi gesekan-gesekan di dalam masyarakat. Ditambah lagi dengan penggunaan media sosial yang mengamplifikasi potensi konflik. Apabila masyarakat tidak kritis dalam menyikapi situasi yang berkembang, maka akan mudah tertipu terhadap pemberitaan yang sifatnya hoax. Misalnya dalam narasa-narasi yang tercipta, bila memilih kelompok A berarti mendukung khilafah, bila mendukung B mendukung penjahan China di Indonesia.

Pandangan dari masyarakatpun beragam terhadap keberadaan FKUB. Mereka melihat FKUB tidak dapat berkontribusi secara optimal, sehingga ada pepatah jangan libatkan FKUB sebagai pemadam kebakaran. Walaupun masyarakat di satu sisi menyadari bahwa moderasi beragama dalam perspektif politik menjadi sangat penting disampaikan.

Langkah yang kemudian dilakukan FKUB adalah bekerjasama dengan Kementerian Agama Kabupaten Kotawaringin Timur dalam *launching* kampung moderasi beragama. Kegiatan yang dilakukan adalah dengan memberikan materi pada berbagai macam agama di kelurahan Parenggean dan Desa Eka Baharui. Dasar dari dipilihnya kampung tersebut adalah karena merupakan kampung binaan bimbingan masyarakat (bimas) Islam yang toleransinya berjalan baik. Masyarakat telah menyadari bahwa urusan keagamaan tetap dibatasi pada urusannya masing-masing tetapi untuk pembangunan desa, mereka bekerjasama saling mendukung dalam berbagai aspek.

Desa Eka Baharui juga memiliki beberapa prestasi diantaranya menjadi desa sadar hukum yang dicanangkan oleh Kejaksaan Kotawaringin Timur. Contoh kasus yang terjadi di tengah masyarakat adalah ketika seorang remaja mencuri harta orang lain. Kasus tersebut tidak sampai dilaporkan ke pihak kepolisian, namun diselesaikan oleh tokoh masyarakat. Pelaku dan orang tua diberi pemahaman sehingga setiap orang tua lebih memperhatikan sikap anaknya. Sikap yang buruk tentunya akan berdampak pada kerukunan umat beragama di desa tersebut.



Gambar 3. Pemberian Materi Pada Kegiatan Kampung Moderasi Beragama

Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, etnis, bahasa, agama dan budaya. Islam sebagai agama mayoritas menjadi contoh bagaimana relasi dengan agama lain dapat tercipta dengan damai. Hal ini disebabkan Islam percaya menjadi *rahmatan lil alamin* atau rahmat bagi semesta alam (Kurniawan, 2020). Islam juga percaya bahwa segala realitas yang diciptakan Allah di alam semesta ini dalam bentuk saling berpasangan. Konsep ini menjadi dasar dalam kegiatan moderasi beragama, dimana Islam dapat menjadi penengah ketika terjadi ketegangan dari masing-masing individu atau kelompok yang berbeda.

Prinsip keseimbangan harus dipegang secara konsisten supaya tidak bergeser pada Tindakan baik yang ekstrem kiri maupun ekstrem kanan.

Negara Indonesia merupakan bangsa yang besar dengan keanekaragaman dan kemajemukan masyarakatnya. Dalam keadaan masyarakat yang multikultural tersebut, maka berpotensi terjadinya konflik yang beresiko memecah belah persatuan dan kesatuan. Realitas seperti ini sering ditemukan dalam berbagai kontestasi demokrasi yaitu dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada). Moderasi beragama menjadi sangat penting ketika dalam proses demokrasi muncul politik identitas yang tentu saja dapat beresiko mencederai nilai-nilai demokrasi (Abqa, 2020).

Moderasi beragama dianggap sebagai ide yang sangat relevan dengan kondisi bangsa Indonesia saat ini. Tidak dapat dipungkiri bahwa karakter agama yang beragam di Indonesia menuntut adanya suatu persepsi yang sama sehingga muncul visi kebangsaan bagi masing-masing tokoh agama. Untuk mencapai visi tersebut, maka dibutuhkan politik moderasi beragama. Jenis politik ini membutuhkan pendekatan dialog yang bersifat spiritual-humanis (Kamal, 2022). Jenis politik seperti ini sudah dilakukan melalui kegiatan Kesbangpol dan FKUB di Kotawaringin Timur, walaupun efektifitas kegiatan ini perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut.

KESIMPULAN

Penguatan moderasi beragama dalam perspektif politik di Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai wilayah yang heterogen dilakukan atas kerjasama antar lembaga pemerintah maupun non pemerintah, elemen masyarakat, organisasi kemasyarakatan (ormas). Kegiatan yang dilakukan oleh Kesbangpol dan FKUB dalam menanamkan nilai-nilai toleransi dalam berpolitik dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya: mengembangkan sikap saling menghormati pilihan masing-masing individu di dalam pemilu, menghindari praktik kecurangan maupun terlibat dalam *money politic*, mengedepankan praktik penggunaan hak pilih, berserikat dan berkumpul tanpa adanya intervensi dari pihak manapun, persamaan terhadap hak-hak setiap warga negara dalam berpolitik dan perubahan sikap mental generasi muda. Kegiatan moderasi beragama ini juga menekankan pentingnya mengamalkan prinsip “mengambil jalan tengah” melalui politik berimbang yang tidak ekstrem mendukung salah satu pihak. Berbagai pengembangan nilai-nilai dalam pendidikan politik moderasi beragama ini perlu dilihat lagi keefektifannya di masa yang akan datang dan di berbagai era kepemimpinan. Hal ini disebabkan karena masing-masing era kepemimpinan memiliki ciri spesifik tertentu.

REFERENSI

- Abqa, M. A. R. (2020). Partai Politik Dan Moderasi Beragama Sebagai Pilar Demokrasi di Indonesia. *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.29303/resiprokal.v2i1.27>
- Aksa, A., & Nurhayati, N. (2020). Moderasi Beragama Berbasis Budaya Dan Kearifan Lokal Pada Masyarakat Donggo Di Bima (TINJAUAN SOSIO-HISTORIS). *Harmoni*, 19(2), Article 2. <https://doi.org/10.32488/harmoni.v19i2.449>
- Al Hady, M. (2023). Kinerja Kesbangpol dalam Penguatan Multikulturalisme Desa Percontohan Kerukunan Umat Beragama di Desa Rama Agung Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu (Doctoral dissertation, IPDN).
- Anggraeni, D., & Adrinoviarini, A. (2020). Strategi Pengawasan Terhadap Ujaran Kebencian Di Media Sosial Pada Pemilu. *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.47776/alwasath.v1i2.60>
- Ardipandanto. (2020). *Dampak Politik Identitas Pada Pilpres 2019: Perspektif Populisme*. 11(1), 43–63.
- Choiri, M. (2013). *Pendidikan Multikultural*. Pustaka Pelajar.
- Hadiz, V. R. (2017). Indonesia's Year of Democratic Setbacks: Towards a New Phase of Deepening Illiberalism? *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 53(3), 261–278. <https://doi.org/10.1080/00074918.2017.1410311>
- Hayat, N., & Nurhakki, N. (2022). Religion Identity And Political Polarization: How Does Labeling Make It Worst? *Palita: Journal of Social Religion Research*, 7(1), Article 1. <https://doi.org/10.24256/pal.v7i1.2715>
- Jubba, H., Awang, J., Qodir, Z., Hannani, & Pabbajah, M. (2022). The contestation between conservative and moderate Muslims in promoting Islamic moderatism in Indonesia. *Cogent Social Sciences*, 8(1), 2116162. <https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2116162>
- Kamal, A. (2022). Politik Moderasi Beragama di Indonesia di Era Disrupsi: Menuju Dialog Spiritual-Humanis. *Moderate El Siyasi: Jurnal Pemikiran Politik Islam*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.30821/moderateel-siyas.v1i1.11035>

Kurniawan, A. (2020). Peran Masjid sebagai Sentra Dakwah Moderasi. *Jurnal Komunikasi Islam (Journal of Islamic Communication)*, 10(1), Article 1. <https://doi.org/10.15642/jki.2020.10.1.125-145>

Lexy J. Moloeng. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.

Prayogi, I. (2019). Populisme Islam dan Imajinasi Politik dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. *Politeia: Jurnal Ilmu Politik*, 11(2), Article 2. <https://doi.org/10.32734/politeia.v11i2.1083>

Salim, K. (2016). Politik Identitas di Maluku Utara. *POLITIK*, 11(2), Article 2. <http://journal.unas.ac.id/politik/article/view/155>

Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.